

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu masalah yang menghimpit bangsa Indonesia yang hingga saat ini belum terselesaikan adalah masalah kemiskinan. Upaya penghapusan kemiskinan di negeri ini dapat lebih efektif dengan memberi ruang bagi perempuan untuk menjadi lebih produktif. Kemandirian ekonomi perempuan pada suatu negara akan berdampak pada peningkatan kualitas kehidupan, kesehatan, pendidikan, dan kebahagiaan pada negara tersebut.

Meningkatkan kemandirian perempuan dalam pembangunan akan menciptakan generasi penerus bangsa yang sehat fisik dan cerdas agar budaya kemiskinan dari suatu keluarga tidak berlanjut. Hal ini mengutip teori dari Oscar Lewis tentang budaya kemiskinan itu diturunkan dari satu generasi ke generasi lain.¹ Ini artinya jika kemiskinan masih menyelimuti kelompok perempuan maka jangka panjangnya dapat melembagakan kemiskinan. Maka peran perempuan dalam pembangunan yang mendasar adalah mempersiapkan anak bangsa yang sehat, cerdas, dan terampil. Peran itu tak mungkin dapat dicapai jika mental perempuannya hanya pasrah terhadap kemiskinan. Hal inilah yang menjadi faktor mengapa

¹ Lukman Soetrisno, *Kemiskinan Perempuan dan Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1997), hlm 90

Pemerintah cenderung banyak menuai kritik dan saran. Program pembangunan yang menuai kritik dari masyarakat pada umumnya karena pada proses yang tidak berkelanjutan atau dalam jangka panjang program hanya sia-sia. Secara kasat mata program yang hanya berupa bantuan dari pemerintah tidak dapat dinikmati secara berlanjut dan selalu mangkrak. Seperti contoh kecil program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang sebenarnya mempunyai tujuan yang baik untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat walaupun hanya sesaat. Banyak bantuan-bantuan secara fisik yang berusaha disalurkan pemerintah untuk mendukung pengembangan masyarakat yang terkadang banyak proses transparansinya kurang meyakinkan masyarakat sehingga sangat wajar masyarakat mengkritik.

Kritik pembangunan atas tidak berlanjut program bantuan pemerintah karena perencanaan yang tidak matang banyak ditemukan di masyarakat metropolitan. Tidak bermaksud membedakan dengan masyarakat pedesaan namun pada dasarnya masyarakat harus menerima bahwa pada kenyataannya masyarakat pedesaan dan perkotaan mempunyai budaya yang berbeda. Pada masyarakat pedesaan teknik pemberdayaan masyarakatnya jelas mempunyai perbedaan karena budaya yang terbentuk dari masing-masing lingkungan berbeda sejak dari awal. Pada masyarakat pedesaan kegiatan pemberdayaan lewat potensi lingkungan atau alam mempunyai peluang keefektifan yang lebih baik dari pada jika diterapkan pada perkotaan. Begitupun selanjutnya pemberdayaan masyarakat lewat

masyarakat terutama dikalangan perempuan warga RW 04 Kampung Mojoklanggru Lor. Oleh karena itu kedua ibu ini yang akan membimbing Ibu-Ibu yang lain yang ingin ikut berpartisipasi. Pada awalnya perempuan Mojoklanggru Lor yang benar-benar selalu aktif menggerakkan kegiatan produksi Konveksi ada Ibu Ninik, Ibu Sri, Ibu Nina , Ibu Evi, Ibu Hamzah, Ibu Yuli. Ibu-Ibu inilah yang saat ini mengatur jalannya produksi konveksi.

Pokmas yang masih berjalan belum lama ini masih pelan-pelan dalam mengembangkan usahanya. Untuk masalah manajemen yang dikelola Ibu-Ibu ini telah mengelolanya dengan perlahan namun pasti. Hasil keuntungan yang diperoleh dari menjual produk konveksi akan dibagi kepada Ibu-Ibu yang aktif tadi. Untuk jumlah hasil keuntungan juga akan disesuaikan dengan kinerja masing-masing anggota yang aktif. Saat ini pasar dari produksi konveksi masih dalam wilayah individu-individu di lingkungan kampung Mojoklanggru Lor yang menjadi konsumen. Namun saat ini ada setelah mulai ikut pameran-pameran Pokmas mendapat borongan untuk memproduksi seragam bu-Ibu PKK.

Dengan berbagai proses yang dialami masyarakat kampung Mojoklanggru Lor tersebut dalam mencoba menggerakkan kelompok ibu-bu yang produktif di kampung, menjadi fokus penelitian untuk memahaminya. Sebuah komunitas yang mempunyai potensi yang pasti untuk menuju perubahan sangat disayangkan jika kurang mendapat apresiasi masyarakat. Maka dibutuhkan sebuah perencanaan partisipatif untuk menekan angka kemunduran Pokmas ekonomi produktif ini.

Tabel 1.1 Rencana pendampingan berbasis ABCD

No.	Kegiatan	Bulan						
		Maret-April	Mei-Juni	Juni-Juli	Ags-Sept	Okt-Nov	Des-Jan	Feb
1	Observasi lapangan	V						
2	Pengurusan perizinan	V						
3	Pembuatan Proposal	V						
4	Proses Pendampingan							
	a. Inkulturasi	V	V	V				
	b. Discovery (Wawancara Apresiatif)		V	V				
	c. Dream		V					
	d. Design (Merencanakan aksi bersama)			V	V			
	e. Define (Pelaksanakan aksi)			V	V	V		
	f. Monitoring dan Evaluasi						V	V
5	Pelaporan							
	a. Bimbingan Pelaporan	V				V	V	
	b. Ujian Skripsi							V

